



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 99 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF**

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
3. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
4. Klasifikasi Arsip Fasilitatif adalah klasifikasi arsip yang berfungsi sebagai penunjang yang berkaitan dengan



pekerjaan pengorganisasian dan kepegawaian, prosedur dan kebijakan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, perencanaan, keuangan, kehumasan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, teknologi informasi dan komunikasi, serta pekerjaan administrasi internal instansi.

5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus menerus.
7. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

#### Pasal 2

Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian Perdagangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk melakukan pengelolaan Arsip Dinamis.

#### Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian Perdagangan menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip.

#### Pasal 4

Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1906

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,  
  
SRI HARIYATI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KLASIFIKASI ARSIP BERDASARKAN FUNGSI FASILITATIF

- HM : Hubungan Masyarakat
- HK : Hukum
- KP : Kepegawaian
- KU : Keuangan
- TU : Ketatausahaan
- OT : Organisasi dan Tata Laksana
- PL : Perlengkapan
- PR : Perencanaan
- RT : Kerumahtanggaan
- PW : Pengawasan
- DL : Pendidikan dan Pelatihan
- PP : Penelitian dan Pengembangan
- TI : Teknologi Informasi dan Komunikasi

A. HUBUNGAN MASYARAKAT

HM. HUBUNGAN MASYARAKAT

00 Penerangan dan Publikasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerangan terhadap masyarakat di bidang perdagangan melalui kegiatan publikasi seperti wawancara, wartawan, konferensi pers (*press realese*), media massa (televisi, radio, surat kabar), dan tanggapan terhadap berita media massa, termasuk layanan informasi publik.



- 01 Dengar pendapat (*hearing*) Dewan Perwakilan Rakyat  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dengar pendapat (*hearing*) dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 02 Hubungan Antar Lembaga
  - 02.00 Lembaga Negara  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah.
  - 02.01 Organisasi Perdagangan Nasional  
Naskah yang berkaitan dengan organisasi perdagangan nasional, antara lain Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Asosiasi, dan Pelaku Usaha.
  - 02.02 Organisasi Perdagangan Internasional  
Naskah yang berkaitan dengan organisasi perdagangan internasional antara lain *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *World Trade Organization (WTO)*, dan *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*.
  - 02.03 Perusahaan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan pihak perusahaan (Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Swasta).
  - 02.04 Organisasi Kemasyarakatan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan organisasi kemasyarakatan.
  - 02.05 Perguruan Tinggi atau Sekolah  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan perguruan tinggi atau sekolah termasuk orientasi lapangan dan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

02.06 Bakohumas

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan (Bakohumas).

03 Keprotokolan

03.00 Upacara atau Acara Kedinasan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan.

03.01 Kunjungan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri dan kunjungan dari masyarakat.

03.02 Agenda Pimpinan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadualan, dan pelaksanaan agenda pimpinan antara lain agenda rapat pimpinan.

04 Dokumentasi dan Penerbitan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi (pemotretan dan *shooting*) dan penerbitan buletin, majalah, jurnal, atau naskah sumber, yang meliputi dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan penyebaran.

05 Penghargaan atau Tanda Kenang-kenangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan serta kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa atau prestasi di bidang perdagangan.

06 Ucapan

Naskah yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan bela sungkawa, dan ucapan permohonan maaf.

07 Dokumen *Hosting*

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan *website*.

B. HUKUM

HK. HUKUM

00 Program Legislasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan program legislasi Kementerian Perdagangan maupun program legislasi nasional.

01 Produk Hukum

01.00 Produk Hukum yang bersifat Pengaturan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur seperti Peraturan perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, Prosedur Tetap (Protap) atau *Standard Operasional Prosedure*, Surat Edaran di bidang perdagangan yang meliputi tahapan persiapan, analisa, penyusunan, pengkoordinasian, perumusan dan pembahasan, sampai dengan pengesahannya.

01.01 Produk Hukum yang bersifat Penetapan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan (Keputusan), yaitu keputusan tentang penetapan kegiatan dan keputusan tentang penetapan pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan sejak awal proses hingga penandatanganan.

02 Perjanjian Kerjasama

02.00 Kerjasama Dalam Negeri

Naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama dalam negeri yang meliputi tahapan persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama.



02.01 Kerjasama Luar Negeri

Naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama luar negeri meliputi tahapan persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama.

03 Bantuan Hukum

03.00 Bantuan Hukum Kasus Perdata

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum perdata di bidang perdagangan.

03.01 Bantuan Hukum Kasus Pidana

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum pidana di bidang perdagangan.

03.02 Bantuan Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum Tata Usaha Negara di bidang perdagangan.

03.03 Advokasi Hukum

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian pelayanan Advokasi hukum dalam kasus hukum di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

04 Telaah Hukum

04.00 Telaah Hukum Internal

Naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk internal Kementerian Perdagangan.

04.01 Telaah Hukum Eksternal

Naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk eksternal.

05 Sosialisasi Hukum

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum dan penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga maupun perorangan.

06 Dokumentasi Hukum

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum, penyebarluasan, dan penyebaran informasi hukum.

07 Hak Atas Kekayaan Intelektual

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pengurusan masalah sampai dengan penyelesaian masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual.

08 Kasus Hukum

Naskah yang berkaitan dengan kasus hukum baik hukum pidana, hukum perdata dan hukum peradilan tata usaha oleh Kementerian Perdagangan.

C. KEPEGAWAIAN

KP. KEPEGAWAIAN

00 Formasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil, yang meliputi pengumpulan bahan untuk penyusunan rencana formasi, rencana penempatan pegawai, rencana penetapan klasifikasi pendidikan, dan persetujuan formasi.

01 Pengadaan

01.00 Penerimaan

Naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai, yang meliputi pengumuman penerimaan, penerimaan lamaran, pemanggilan, ujian, dan pengumuman akhir penerimaan pegawai.

01.01 Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil

Naskah yang berkaitan dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pemeriksaan kesehatan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

01.02 Prajabatan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan prajabatan.

01.03 Penempatan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di unit kerja.

02 Ujian Kenaikan Pangkat dan Ujian Kenaikan Jabatan

02.00 Ujian Penyesuaian Ijazah

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil.

02.01 Ujian Dinas

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil.

02.02 Ujian Kompetensi

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian kompetensi untuk kenaikan jabatan.

03 Mutasi

03.00 Kenaikan Pangkat/Golongan

Naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil.



03.01 Kenaikan Gaji Berkala

Naskah yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil.

03.02 Penyesuaian Masa Kerja

Naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji.

03.03 Penyesuaian Tunjangan Keluarga

Naskah yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga.

03.04 Promosi

Naskah yang berkaitan dengan promosi jabatan.

03.05 Rotasi Kerja

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan rotasi kerja dalam rangka pemantapan tugas.

03.06 Alih Tugas

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas antara lain mutasi antar instansi, pegawai yang dipekerjakan, dan pegawai yang diperbantukan.

04 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan

04.00 Pengangkatan Jabatan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional termasuk pelantikan jabatan.

04.01 Pemberhentian Jabatan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural atau jabatan fungsional.

05 Pendelegasian Wewenang

05.00 Pelaksana Tugas (Plt)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan apabila pejabat definitifnya belum dilantik.

05.01 Pelaksana Harian (Plh)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif tidak dapat menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, sakit, mengikuti pendidikan dan pelatihan).

06 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

06.00 Program Diploma

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan diploma yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Diploma.

06.01 Program Sarjana

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sarjana yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Sarjana.

06.02 Program Pasca Sarjana

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan Pasca Sarjana yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Pasca Sarjana.

06.03 Program Doktorat

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan Doktorat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Doktorat.

06.04 Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan penjenjangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan penjenjangan pegawai tingkat eselon I sampai dengan tingkat eselon IV.

06.05 Kursus atau Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus atau pendidikan dan pelatihan fungsional meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kursus atau pendidikan dan pelatihan fungsional.

06.06 Kursus atau Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus atau pendidikan dan pelatihan teknis yang meliputi perencanaan, pelaporan dan evaluasi kursus atau pendidikan dan pelatihan teknis.

07 Administrasi Pegawai

07.00 Data dan Keterangan Pegawai

Naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai termasuk presensi pegawai.

07.01 Kartu Pegawai

Naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai.

07.02 Kartu Istri dan Kartu Suami

Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu).

07.03 Kartu Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen)

Naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu Taspen.



07.04 Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Naskah yang berkaitan dengan pengurusan BPJS.

07.05 Tanda Jasa

Naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda jasa kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan.

08 Pembinaan Pegawai

08.00 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Naskah yang berkaitan dengan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

08.01 Satuan Kinerja Pegawai (SKP)

Naskah yang berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai.

08.02 Pembinaan Mental

Naskah yang berkaitan dengan pembinaan mental pegawai termasuk ceramah keagamaan.

08.03 Hukuman Disiplin

Naskah yang berkaitan dengan proses pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat/golongan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

09 Pembinaan Jabatan Fungsional

09.00 Jabatan Fungsional Arsiparis

Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Arsiparis, meliputi pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.

09.01 Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Analis Kepegawaian, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.

09.02 Jabatan Fungsional Widyaiswara

Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Widyaiswara, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.

09.03 Jabatan Fungsional Peneliti

Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Peneliti, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.

09.04 Jabatan Fungsional Perencana

Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Perencana, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.

09.05 Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.

09.06 Jabatan Fungsional Auditor

Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Auditor, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan



fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.

09.07 Jabatan fungsional Pustakawan

Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Pustakawan, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit dan pemberian tunjangan jabatan.

09.08 Jabatan fungsional Pranata Komputer

Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Pranata Komputer, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.

09.09 Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.

09.10 Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional analis perdagangan meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.

09.11 Jabatan Fungsional Lainnya

Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional lainnya, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.



10 Kesejahteraan

10.00 Kesehatan

Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai, *general check up* pejabat.

10.01 Cuti

Naskah yang berkaitan dengan hak cuti pegawai yang meliputi cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar, dan cuti di luar tanggungan negara.

10.02 Rekreasi, Kesenian, dan Olah Raga

Naskah yang berkaitan dengan rekreasi, kesenian, dan olah raga.

10.03 Bantuan Sosial

Naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk bantuan sosial yang diberikan oleh dan/atau kepada pihak lain, dan sumbangan-sumbangan lainnya.

10.04 Perumahan

Naskah yang berkaitan dengan perumahan pegawai Kementerian Perdagangan.

11 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

11.00 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dengan Hormat

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hak pensiun, yang meliputi proses pengajuan permohonan sampai dengan ditetapkannya keputusan pensiun termasuk pensiun/duda/janda/anak dan Taspen.

11.01 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat

Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, meliputi proses pengajuan, proses pemberhentian sampai ditetapkannya keputusan pemberhentian pegawai.

12 Organisasi Non Kedinasan

12.00 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI Kementerian Perdagangan.

12.01 Dharma Wanita

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dharma wanita Kementerian Perdagangan.

12.02 Koperasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan koperasi Kementerian Perdagangan.

12.03 Yayasan Kementerian Perdagangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

12.04 Organisasi Lainnya

Naskah yang berkaitan dengan organisasi non kedinasan lainnya.

D. KEUANGAN

KU. KEUANGAN

00 Pelaksanaan Anggaran

00.00 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Petunjuk Operasional Kegiatan (DIPA/POK)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran yang berupa penyusunan DIPA,POK, dan revisi DIPA/POK.

00.01 Rencana Anggaran Belanja (RAB)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan RAB.

00.02 Penggajian

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran berupa penggajian kepada pegawai, termasuk daftar gaji pegawai dan bukti pembayarannya.

00.03 Pengeluaran Anggaran

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran, meliputi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SSP-TUP), Surat Kuasa, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), petunjuk pelaksanaan/ mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bahan Nota Keuangan.

01 Pengelolaan Perbendaharaan

01.00 Perbendaharaan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa Surat Keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara pengeluaran, dan Bendahara penerimaan.

01.01 Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa KP4 yaitu surat keterangan untuk mendapat tunjangan keluarga dan surat keterangan lainnya.



01.02 Kartu Pengawasan Kredit

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa kartu pengawasan kredit anggaran.

01.03 Pajak

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan Surat Setoran Pajak (SSP).

01.04 Penerimaan Non Pajak

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan penyeteroran non pajak melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara.

01.05 Pengembalian Belanja

Naskah yang berkaitan dengan pengembalian belanja, berupa pengembalian belanja pegawai, pengembalian belanja barang, dan pengembalian belanja modal melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).

01.06 Tagihan Penerimaan Negara

Naskah yang berkaitan dengan penerimaan negara berupa pendapatan maupun pengembalian belanja melalui Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

01.07 Berita Acara Pemeriksaan Kas

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa berita acara pemeriksaan kas.

01.08 Verifikasi Anggaran

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/ penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran

disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran anggaran.

01.09 Pembukaan Anggaran

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anggaran berupa Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BKP), kartu realisasi anggaran, dan kartu pengawasan realisasi anggaran.

02 Perhitungan Anggaran

Naskah yang berkaitan dengan perhitungan anggaran berupa Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

03 Ketatausahaan Keuangan

03.00 Keterangan Penghasilan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa keterangan penghasilan perorangan.

03.01 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).

03.02 Permohonan Pinjaman

Naskah yang berkaitan dengan ketatausahaan keuangan yang berupa permohonan pinjaman.

03.03 Iuran Keanggotaan Organisasi

Naskah yang berkaitan dengan iuran keanggotaan dalam organisasi tingkat nasional dan organisasi internasional, meliputi pendaftaran, pembayaran iuran anggota, dan laporan.

E. KETATAUSAHAAN

TU. KETATAUSAHAAN

00 Persuratan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahannya, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel, dan pengiriman surat/barang cetakan.

00.00 Pengurusan Surat Masuk

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat masuk.

00.01 Pengurusan Surat Keluar

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat keluar.

01 Penggandaan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggandaan dalam rangka kedinasan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

02 Kearsipan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Kearsipan dinamis di lingkungan Kementerian Perdagangan.

02.00 Pembinaan Kearsipan (Internal)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan Kearsipan dinamis meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, pelatihan teknis, dan fasilitasi fungsional arsiparis.

02.01 Penyusunan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang Kearsipan, yang meliputi Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.

02.02 Penggunaan Arsip Aktif

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan Arsip, seperti daftar Arsip Aktif, dan lain-lain.



02.03 Pemindahan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan Arsip.

02.04 Pemusnahan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan Arsip.

02.05 Penyerahan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan Arsip.

02.06 Layanan Arsip Inaktif

Naskah yang berkaitan dengan layanan Arsip Inaktif seperti daftar Arsip Inaktif, peminjaman Arsip, dan lain-lain.

02.07 Pemeliharaan/Perawatan Arsip

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan/perawatan arsip.

02.08 Program Arsip Terjaga

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan program arsip terjaga.

03. Rapat, Rapat Koordinasi, dan Rapat Kerja Teknis

Naskah yang berkaitan dengan rapat, rapat pimpinan, rapat koordinasi, rapat kerja teknis internal Kementerian Perdagangan, notulen, dan hasil pembahasannya.

04. Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas dalam dan luar negeri termasuk pengurusan passport, visa, *exit permit*, sampai dengan laporan perjalanan dinas.

F. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

OT. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

00 Organisasi

Naskah yang berkaitan dengan perubahan organisasi yang meliputi analisis, evaluasi, dan perumusan organisasi.

01 Uraian Tugas

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan uraian tugas unit kerja, jabatan struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum.

02 Analisis Jabatan dan Beban Kerja

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis, evaluasi, rentang kendali jabatan, dan beban kerja.

03 Mekanisme Kerja

Naskah yang berkaitan dengan pembuatan mekanisme kerja yang meliputi penyusunan *Standard Operasional Prosedures* (SOP) dan tata kerja termasuk berkas reformasi birokrasi.

04 Ketatalaksanaan

Naskah yang berkaitan dengan ketatalaksanaan termasuk pembuatan pedoman hubungan kerja yang meliputi pola hubungan antar struktural, antar fungsional, dan antara struktural dengan fungsional.

G. PERLENGKAPAN

PL. PERLENGKAPAN

00 Perencanaan Kebutuhan

Naskah yang berkaitan dengan usulan dan rencana kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dan pengelolaannya.

01 Pengadaan

01.00 Perlengkapan Kantor

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan perlengkapan kantor (ATK) mulai dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima.

01.01 Peralatan Kantor

Naskah yang berkaitan dengan pengadaan peralatan kantor seperti meja, kursi, lemari, rak *filing* kabinet, brankas dan lain sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima.

01.02 Tanah dan Bangunan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah dan bangunan kantor termasuk bukti kepemilikan aset/ kekayaan (sertifikat, Izin Mendirikan Bangunan), dan rumah dinas dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

01.03 Jasa

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa mulai dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

01.04 Kendaraan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan kendaraan dinas, baik kendaraan beroda dua atau beroda empat termasuk bukti kepemilikan (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)) dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

01.05 Instalasi/Jaringan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan instalasi listrik, air, telepon, *Local Area Network (LAN)*, dan sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.



01.06 Peralatan Perdagangan Lainnya

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan peralatan perdagangan seperti perangkat alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) mulai dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima.

02 Penggunaan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan status penggunaan BMN.

03 Pemanfaatan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan BMN mulai dari proses awal usulan sampai terbit izin pemanfaatan dan kontrak antar pihak.

04 Distribusi dan Penyimpanan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran BMN dari gudang serta pendistribusiannya untuk kepentingan intern maupun ekstern.

05 Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemusnahan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahtanganan, penghapusan, dan pemusnahan mulai dari proses awal usulan hingga terbitnya Berita Acara dan Surat Keputusan.

06 Penatausahaan dan Inventarisasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan maupun inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian Perdagangan, seperti Laporan Persediaan, Laporan BMN, dan Laporan Inventarisasi BMN.

07 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan penetapan kebijakan BMN baik kebijakan umum dan teknis serta kegiatan yang bersifat penertiban dan pemantauan/investigasi.

## H. PERENCANAAN

### PR. PERENCANAAN

#### 00 Usulan Perencanaan

Naskah yang berkaitan dengan usulan perencanaan program kerja dari masing-masing unit kerja.

#### 01 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan

##### 01.00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJP.

##### 01.01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJM.

#### 02 Rencana Kerja Tahunan

##### 02.00 Rencana Kerja Tahunan Kementerian Perdagangan

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan Kementerian Perdagangan, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana kerja Tahunan, Musrenbangnas dan Rakorbangpus.

##### 02.01 Perjanjian Kinerja

Naskah yang berkaitan dengan Perjanjian kinerja dengan atasan langsung seperti Eselon II dengan Eselon I, Eselon I dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perdagangan dengan Presiden dan Menteri Koordinator.

#### 03 Penyusunan Rencana Anggaran

##### 03.00 Penyusunan Rencana Anggaran Kementerian Perdagangan

Naskah yang berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran Kementerian Perdagangan seperti Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional (PO), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Standar Biaya Khusus (SBK).



03.01 Revisi Dokumen Anggaran

Naskah yang berhubungan dengan revisi/perubahan dokumen anggaran seperti revisi DIPA dan PO.

04 Laporan

04.00 Laporan Berkala

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja yang disusun seperti (laporan Triwulan, laporan Tahunan) Kementerian Perdagangan.

04.01 Laporan Khusus

Naskah yang berkaitan dengan laporan khusus, yang meliputi laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti Pidato Presiden, Rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

04.02 *Progress Report*

Naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun).

04.03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal.

04.04 Evaluasi kegiatan

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi kinerja berdasarkan kegiatan.



I. KERUMAHTANGGAAN

RT. KERUMAHTANGGAAN

00 Fasilitas Kantor

00.00 Kendaraan Dinas

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas, seperti formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas, dan laporan kehilangan kendaraan.

00.01 Ruang Rapat dan Konsumsi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan ruang rapat berikut sarana kelengkapan rapat termasuk penyediaan konsumsi dan administrasinya.

00.02 Telekomunikasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan sarana telekomunikasi (telepon).

00.03 Rumah Jabatan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan rumah jabatan seperti perawatan dan pemeliharaan fisik bangunan rumah jabatan dan pengamanannya.

01 Tata Ruang

Naskah yang berkaitan dengan pengaturan dan penataan ruangan baik ruang kerja maupun ruang publik.

02 Pemeliharaan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan kerusakan, perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi, perbaikan/*service* kendaraan dinas serta kebersihan taman dan lingkungan kantor.

03 Pengamanan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan lingkungan kantor seperti daftar piket satpam/*security*, buku/formulir tamu, pengaturan akses masuk lingkungan kantor Kementerian Perdagangan dan pengaturan perpakiran termasuk kartu parkir.

J. PENGAWASAN

PW. PENGAWASAN

00 Audit

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit seperti audit operasional, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit BMN, serta kegiatan audit lainnya yang meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan.

01 Review

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan review atas pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.

02 Evaluasi

Naskah yang berkaitan dengan evaluasi atas suatu kegiatan seperti evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta evaluasi kegiatan lainnya meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan.

03 Pengaduan Masyarakat

03.00 Internal

Naskah yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat yang datang dari internal Kementerian Perdagangan dan laporan penyelesaiannya.

03.01 Eksternal

Naskah yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat yang datang dari eksternal Kementerian Perdagangan dan laporan penyelesaiannya.

04 Pengawasan Melekat

Naskah yang berkaitan dengan pengawasan melekat, proses pemeriksaan pengawasan sampai dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, termasuk pakta integritas.

05 Laporan Hasil Pengawasan

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Perdagangan semesteran dan tahunan, yang meliputi ikhtisar laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Perdagangan yang disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan serta tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

06 Pemantauan

06.00 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan/program dan percepatan penyerapan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang meliputi kegiatan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

06.01 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) meliputi Laporan kehilangan, Berita Acara kehilangan barang/uang, Keputusan tanggung jawab mutlak/surat kesanggupan untuk mengganti ke Kas Negara, Keputusan penghapusan uang dan barang, dan laporan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR).



06.02 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP)

Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, atau Laporan Hasil Pemeriksaan lainnya yang ditindaklanjuti sampai dengan pelaporan.

06.03 Penerapan *Early Warning System*

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada unit kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan.

06.04 Pemantauan Disiplin Pegawai

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan sampai dengan laporan.

07 Kegiatan pengawasan lainnya

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, bimbingan dan konsultasi pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, keikutsertaan dalam forum bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan forum komunikasi lainnya.

K. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DL. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

00 Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan

00.00 Perencanaan Kebutuhan

Naskah yang berkaitan dengan analisa/perencanaan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, meliputi anggaran, peserta, waktu pelaksanaan, sistem dan metode, bahan ajar, kurikulum/silabus, tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan.

00.01 Sistem dan Metode

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan sistem dan metode pendidikan dan pelatihan perdagangan.

00.02 Kurikulum/Silabus

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan kurikulum/silabus pendidikan dan pelatihan perdagangan.

00.03 Bahan Ajar/Modul

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan bahan ajar/modul pendidikan dan pelatihan perdagangan.

00.04 Konsultasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian konsultasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

01 Penyelenggaraan dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan

01.00 Pendidikan dan pelatihan Teknis Perdagangan

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan terkait teknis bidang Perdagangan.

01.01 Pendidikan dan pelatihan non teknis Perdagangan

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan terkait non teknis bidang Perdagangan.

01.01 Teknis Pimpinan Lembaga/Unit Perdagangan

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perdagangan bagi pimpinan lembaga perdagangan dan pimpinan unit perdagangan.

01.03 Evaluasi Pasca Pendidikan dan pelatihan

Naskah yang berkaitan dengan evaluasi setelah pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan.

02 *Database* Tenaga Pengajar

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan *database* tenaga pengajar perdagangan.

03 *Database* Alumni

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan *database* alumni pendidikan dan pelatihan perdagangan.

L. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

PP. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

00 Pengkajian

00.00 Sistem Perdagangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian sistem perdagangan dinamis maupun statis yang meliputi rapat persiapan, *study referensi*, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/*survey*, analisis data, pembahasan hasil *survey*, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, dan pencetakan.

00.01 Kelembagaan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian terkait kelembagaan perdagangan yang meliputi rapat persiapan, *study referensi*, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/*survey*, analisis data, pembahasan hasil *survey*, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, dan pencetakan.

00.02 Sumber Daya Manusia

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian sumber daya manusia perdagangan baik yang berada di unit pencipta Arsip maupun lembaga perdagangan, yang meliputi rapat persiapan, *study referensi*, penyusunan



instrumen penelitian, pengumpulan data/*survey*, analisis data, pembahasan hasil *survey*, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, dan pencetakan.

#### 00.03 Sarana Prasarana

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian terkait sarana prasarana perdagangan, yang meliputi rapat persiapan, *study referensi*, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/*survey*, analisis data, pembahasan hasil *survey*, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir dan pencetakan, *study referensi*, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/*survey*, analisis data, pembahasan hasil *survey*, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, dan pencetakan.

### 01 Pengembangan

#### 01.00 Sistem Perdagangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian sistem perdagangan dinamis maupun statis yang berupa penyusunan norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang meliputi rapat persiapan, *study referensi*, penyusunan kuisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan *survey*, pembahasan hasil *survey*, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan.

#### 01.01 Kelembagaan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian terkait kelembagaan yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang meliputi rapat persiapan, *study referensi*, penyusunan kuisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan *survey*, pembahasan hasil *survey*, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan.

#### 01.02 Sumber Daya Manusia

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian Sumber Daya Manusia Perdagangan yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang meliputi rapat persiapan, *study referensi*, penyusunan kuisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan *survey*, pembahasan hasil *survey*, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan.

#### 01.03 Sarana Prasarana

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian terkait sarana dan prasarana yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang meliputi rapat persiapan, *study referensi*, penyusunan kuisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan *survey*, pembahasan hasil *survey*, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan.

#### 02 Diseminasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyebaran hasil kajian dan NSPK yang telah disusun yang meliputi kegiatan persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi.

#### 03 Publikasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi hasil pengkajian dan pengembangan perdagangan melalui Jurnal/ Bunga Rampai/ *Leaflet*/ Warta yang meliputi kegiatan pembentukan dewan redaksi, pengumuman penulisan, penentuan tema, pengumpulan artikel/karya ilmiah, proses review, proses editing, pembuatan *dummy*, pencetakan, dan pendistribusian.



04 Seminar/ *Call of Paper*/Bedah Naskah

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan untuk mendukung pengelolaan publikasi jurnal/bunga rampai yang meliputi kegiatan persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi.

M. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

TI. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

00. Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Naskah yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi teknologi informasi dan komunikasi serta data dan informasi, antara lain berupa naskah persuratan, peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.

01 Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

01.00 Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana strategis di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi *masterplan* dan *roadmap* teknologi informasi dan komunikasi serta indikator kinerja teknologi informasi dan komunikasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi rencana strategis di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.

01.01 Arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi (infrastruktur), antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan



instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.

01.02 Perencanaan Manajemen Risiko Teknologi Informasi dan Komunikasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan manajemen risiko di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi *risk assessment* dan rencana tindakan penanganan risiko, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi perencanaan manajemen risiko di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.

01.03 Perencanaan Manajemen Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan manajemen investasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi analisis *cost benefit*, evaluasi investasi dan risikonya, serta penentuan prioritas investasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dan lain-lain.

01.04 Perencanaan Manajemen Data dan Informasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan manajemen data dan informasi meliputi analisis kebutuhan data dan informasi, serta penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan data dan informasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dan lain-lain.

## 02 Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

### 02.00 Pengembangan Infrastruktur

Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan infrastruktur meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengembangan infrastruktur, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan infrastruktur, dan lain-lain.

### 02.01 Pengembangan Aplikasi

Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan aplikasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengembangan aplikasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan aplikasi, dan lain-lain.

### 02.02 Pengembangan Basis Data

Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan basis data meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengembangan basis data, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan basis data, dan lain-lain.



### 02.03 Pengembangan Data dan Informasi

Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan data dan informasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengembangan data dan informasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan data dan informasi, dan lain-lain.

## 02 Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

### 03.00 Pengelolaan Infrastruktur

Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan infrastruktur meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan infrastruktur, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengelolaan infrastruktur, dan lain-lain.

### 03.01 Pengelolaan Aplikasi

Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan aplikasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan aplikasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengelolaan aplikasi, dan lain-lain.

### 03.02 Pengelolaan Basis Data

Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan basis data meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan basis data, antara lain



berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengelolaan basis data, dan lain-lain.

#### 03.03 Pengelolaan Data dan Informasi

Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan data dan informasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengelolaan data dan informasi, dan lain-lain.

#### 03.04 Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan layanan teknologi informasi dan komunikasi beserta *help desk*-nya seperti layanan *email*, *wifi*, *troubleshoot*, pembuatan *subdomain*, dan penempatan *server*, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.

#### 03.05 Layanan Data dan Informasi

Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan layanan data dan informasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan layanan data dan informasi beserta *help desk*-nya, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan,

dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi layanan data dan informasi, dan lain-lain.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,  
  
SRI HARIYATI